

WANDA DAN PENCITRAAN LEKSIKAL (Interpretasi dalam Ranah Pragmatik Kritis)

Rangga Asmara
Universitas Tidar
rangga.asmara@hotmail.com

Abstrak

Di dalam setiap teks selalu terkandung ideologi. Bahasa tidak dapat dipandang sebagai entitas yang netral, tetapi memiliki ideologi yang membawa muatan kekuasaan. Ideologi dan kekuasaan tercermin dalam pemakaian kosakata, kalimat, dan struktur wacana. Wacana pencitraan Wanda Hamidah dipandang sebagai sebuah teks yang memuat satu sistem tanda yang terorganisasi dan merefleksikan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu. Kemasan bahasa pencitraan secara sengaja dibuat untuk mengacaukan subjek dan objek sebuah kalimat sehingga pendengar rancu. Permainan ini dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab, menokohkan seseorang (glorifikasi), atau menuai simpati. Penggunaan bahasa pencitraan yang bersayap menjadi manifestasi ekspresi ideologi untuk membentuk pendapat umum dengan mencitrakan diri secara positif. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian linguistik yang memadukan pendekatan pragmatis dan kritis, menjadi pragmatik kritis. Wujud wacana yang dianalisis adalah tuturan Wanda Hamidah sebagai respons terhadap pemecatannya sebagai kader PAN. Teknik analisis data yang digunakan model analisis Fairclough yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa bahasa pencitraan sebagai strategi menanamkan ideologi yang dilakukan oleh Wanda Hamidah tampak pada bentuk-bentuk formal teks. Wanda memainkan wacana pencitraan leksikal dengan menonjolkan bentuk-bentuk formal leksikal berupa modalitas, pronomina, kalimat positif-negatif, dan kata penghubung.

Kata kunci: Wanda Hamidah, pencitraan leksikal, dan pragmatik kritis

Abstract

Every text contains an ideology. A language is not only seen as neutral entity, but also as an ideology which brings power as its contents. Both ideology and power are reflected in the use of lexicon, sentence, and discourse structure. The discourse of Wanda's political imaging is seen as a text which covers an organized symbolic system and reflects attitude, beliefs, and particular values. The formation of political imaging language is intentionally made by disorganizing subject and object in a sentence in order to make the listeners confused. This rule is used to avoid responsibility, put someone as the leader (glorification) and result sympathy. The use of implicit language for political imaging becomes manifestation of ideology expression to form the public opinion by imaging herself has a positive political imaging. This research implements a linguistic research method which combines pragmatic and critical approaches becomes critical pragmatic approach. The object of the research is Wanda Hamidah discourse when she uttered her responses after she got fired as a PAN political member. The techniques of data analysis which is used in Fairclough analysis are texts, *discourse practice*, and *sociocultural practice*. This research found that the language of political imaging which functions as the strategies of investing ideology done by Wanda Hamidah was seen from formal texts. Wanda plays lexical political imaging discourse by showing the formal and lexical forms in the forms of modality, pronouns, negative and positive sentences, and conjunction.

Keywords: Wanda Hamidah, lexical imaging, critical pragmatic

A. Pendahuluan

Bahasa memiliki arti yang sangat penting dalam dunia politik. Bahasa menjadi media yang ampuh untuk menanamkan ideologi, merebut atau mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan. Berbagai piranti kebahasaan dimanfaatkan untuk meraih simpati, menarik perhatian, dan membuat persepsi terhadap suatu masalah, mengendalikan pikiran, perilaku serta nilai yang dianut khalayak.

Bahasa berfungsi sebagai sarana dalam melakukan kontrol ideologis dan kontrol kekuasaan. Proses-proses penanaman ideologis dan pengontrolan kekuasaan memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi. Salah satu alat ekspresi yang sering digunakan politisi adalah dengan berwacana yang memuat pencitraan di media massa.

Pencitraan politik merupakan bentuk 'penggalangan' kekuasaan melalui media massa dengan memanfaatkan fitur-fitur linguistik. Melalui berita di media massa, politisi berusaha membujuk masyarakat dengan pencitraannya. Pernyataan politisi merupakan sarana yang bertujuan membentuk persepsi dan meraih simpati publik.

Ada banyak strategi yang dilakukan politisi untuk mengungkapkan sesuatu yang benar tampak salah dan sebaliknya. Begitu pula, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan persoalan domestik-personal agar seolah-olah tampak menjadi persoalan publik.

Salah satu wacana aktual yang cukup menarik untuk diteliti yaitu pemecatan Wanda Hamidah sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). DPP PAN memecat Wanda karena mendukung calon presiden dan wakil presiden yang bukan diusung oleh PAN. Sebagai bentuk respons dari pemecatan tersebut, Wanda mengadakan pertemuan pers untuk menanggapi masalah pemecatannya. Wacana yang dituturkan Wanda di dalamnya diduga sarat dengan muatan pencitraan yang dapat membentuk persepsi dan meraih simpati publik.

Wacana pencitraan Wanda dapat dianggap sebagai sebuah teks yang memuat konteks ideologi dan kekuasaan yang merefleksikan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu. Wacana tersebut diduga memiliki daya pikat dan daya pengaruh yang tinggi untuk dapat menggiring opini masyarakat mengambil keputusan atau tindakan yang sesuai dengan kehendak si politisi, yakni memilih salah satu calon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Wacana pencitraan Wanda menarik untuk dicermati dan dikaji secara mendalam dengan pendekatan pragmatik dan analisis wacana kritis. Dalam penelitian ini dipadukan pendekatan pragmatik dan kritis, menjadi pragmatik kritis karena dijumpai fenomena empiris yang tidak cukup dikaji hanya dengan pendekatan pragmatik.

Pragmatik dan analisis wacana kritis secara teoretis mungkin dipadukan karena memiliki kesesuaian, yakni sama-sama memperhitungkan konteks sekalipun dalam lingkup atau jangkauan yang tidak sama. Dalam pragmatik, konteks merupakan latar belakang pengetahuan apa pun yang diasumsikan dimiliki bersama oleh penutur maupun pendengar, dan membantu pendengar menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh penutur. Konteks dalam pragmatik sebatas pada latar situasional yang melingkupi pertuturan antarpersonal. Sementara itu, dalam analisis wacana kritis melibatkan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis, kekuasaan, dan juga ideologi. Tidak setiap wacana dapat dan perlu dianalisis dengan pragmatik kritis. Ranah jelahannya adalah wacana-wacana (penggunaan bahasa lisan maupun tertulis) yang di dalamnya terkandung motif dan relasi kekuasaan dan motif ideologi yang bisa berdampak luas.

Penggunaan bahasa oleh politisi bukan hanya persoalan linguistik, tetapi ekspresi kekuasaan dan ideologi yang memuat motif untuk membentuk pendapat umum dengan membenarkan pendapat satu pihak dan menyalahkan pihak lain (Jufri, 2005:1). Wacana pencitraan Wanda dapat dipandang sebagai upaya elit politik untuk membentuk pendapat umum mengenai pencitraan dirinya.

B. Sekapur Sirih tentang Pragmatik Kritis

Analisis wacana (*discourse analysis*) diperkenalkan Harris melalui artikel *Discourse Analysis* dalam jurnal *Language*, No. 28/1952, 1-30. Dalam artikel itu Harris membicarakan wacana iklan dengan menelaah saling hubungan antara kalimat-kalimat yang menyusunnya dan kaitan antara teks dengan masyarakat dan budaya (lih. Renkema, 2004:7). Sementara itu, Asher dan Simpson, ed. (1994:940) membagi pendekatan dalam analisis wacana menjadi tiga, yaitu (i) pendekatan formal, (ii) pendekatan sosiologis-empiris, dan (iii) pendekatan kritis.

Pendekatan formal memahami wacana sebagai tataran kebahasaan yang lebih tinggi dari kalimat. Pendekatan formal mengkaji wacana dari segi jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Pendekatan sosiologis-empiris memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi (Asher dan Simpson, 1994:940). Pendekatan ini mengkaji wacana dalam kaitannya dengan konteks situasi secara pragmatik. Pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai *power* (Asher dan Simpson, 1994:940). Wacana dipandang sebagai sebuah cerminan dari relasi kekuasaan dalam masyarakat (Renkema, 2004:282). Pendekatan kritis (CDA) memahami wacana (lisan maupun tertulis) sebagai bentuk praktik sosial (Wodak, 2006; Titscher, *et al.*, 2000:147; Renkema, 2004). Seseorang memiliki tujuan berwacana, termasuk menjalankan kekuasaan.

Dalam tradisi CDA, atribut kritis mencerminkan dua latar CDA (periksa Titscher, *et al.*, 2000:144-145; Wodak, 2006:2-3). Pertama, CDA dibangun berdasarkan gagasan-gagasan

kritis Sekolah Frankfurt (terutama Jurgen Habermas). Menurut Habermas, ilmu kritis (*critical science*) harus sampai pada refleksi diri, yakni harus merefleksikan interes-teres awal yang menjadi dasarnya, dan mengindahkan konteks historis dari interaksi yang dilibatkannya. Terkait dengan linguistik, kajian bahasa mestinya tidak hanya berhenti pada perian segi-segi bahasa, tetapi membahas fungsinya dalam komunikasi, bahkan sampai merefleksikan manusia penggunaannya.

Kedua, CDA merupakan kelanjutan dari tradisi linguistik kritis. Istilah linguistik kritis pertama kali muncul terkait dengan kajian para pengikut Halliday (terutama Roger Flower, Gunter Kress, dan Bob Hodge) tentang fungsi bahasa dalam masyarakat. Situasi darurat yang memunculkan perspektif kritis dalam linguistik dapat dipahami sebagai reaksi terhadap pragmatik kontemporer (terutama atas teori tindak tutur Austin dan Searle) dan sosiolinguistik kuantitatif-korelatif William Labov. Jacob Mey (1985) dalam buku *Whose Language?* bicara berapi-api mendukung arah kritis dalam pragmatik. Kress dan Hodge (1979) dalam buku *Language as Ideology* mengemukakan pandangan bahwa wacana tidak mungkin ada tanpa makna sosial, dan karenanya terjalin kaitan erat antara struktur kebahasaan dan struktur sosial. Pandangan tersebut kemudian melahirkan pendekatan CDA yang berciri interdisipliner.

Demikianlah, kritis dalam pragmatik kritis dapat dirumuskan sebagai kemampuan atau daya dalam mengungkap makna sosial wacana bahasa serta merefleksikan manusia penggunaannya. Untuk dapat mencapai kemampuan atau daya itu, pragmatik kritis perlu memiliki prasangka ideologis dalam setiap telaahnya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai kajian pragmatik.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian linguistik yang memadukan pendekatan pragmatis dan kritis, menjadi pragmatik kritis. Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada fitur-fitur linguistik melalui pemikiran sosial, politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Eriyanto, 2001:286).

Wujud wacana yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tuturan Wanda Hamidah sebagai respons terhadap pemecatannya sebagai kader PAN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik rekam dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Fairclough yaitu: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

Dalam model Fairclough, teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Dalam penelitian ini hanya memberi perhatian pada kosakata atau leksikon. Elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. Pertama, ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks yang bisa jadi membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan di antara pembuat wacana dengan petuturnya, seperti apakah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup. Ketiga, identitas merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas pembuat wacana dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan (Eriyanto, 2001:286-287).

D. Pencitraan Leksikal dalam Tuturan Wanda Hamidah

Bahasa pencitraan sebagai strategi menanamkan ideologi yang dilakukan oleh Wanda Hamidah sebagai respons terhadap pemecatannya sebagai kader PAN dapat dilihat pada bentuk-bentuk formal teks tuturannya. Berikut transkripsi teks Wanda saat diwawancarai salah satu stasiun televisi pada Selasa, 16 September 2014.

"Sebagai orang yang turut mendirikan PAN sejak berdirinya tahun 1998, saya menerima konsekuensi logis atas langkah yang saya lakukan pada Pilpres kemarin, saya sedih karena sudah 16 tahun di PAN sejak berdirinya. Saya tidak ada kekecewaan dan SAYA tidak ada penyesalan apa pun atas

pemberhentian dari Partai Amanat Nasional. Tapi sebaliknya, kekecewaan saya justru terhadap apa yang mengancam kita. Yaitu hasrat kekuatan elit politik yang hendak memasung suara saya, yang hendak memasung suara Anda. Dan hasrat kekuatan elit yang hendak memasung suara rakyat. Dan ikhtiar politik saya pada pilpres kemarin bukan karena tanpa alasan, saya memilih pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla karena saya bersetia pada amanat nasional dan cita-cita reformasi."

Dalam teks tersebut, Wanda memainkan wacana pencitraan leksikal dengan menonjolkan bentuk-bentuk formal leksikal berupa modalitas, pronomina, kalimat positif-negatif, dan kata penghubung.

a. Pencitraan melalui Modalitas

Menurut Lyons (1977) modalitas merupakan alat yang dipergunakan oleh seorang pembicara guna menggambarkan sikapnya. Sikap ini dihubungkan dengan isi tuturannya dengan apa yang dikatakannya terhadap pendengarnya. Modalitas didayagunakan Wanda untuk mencitrakan ketegasan atas sikap yang dimiliki. Ragam modalitas yang digunakan yaitu 1) modalitas pikiran (berdasarkan logika): *saya menerima konsekuensi logis*, 2) modalitas apresiatif (berdasarkan perasaan): *kekecewaan saya, saya sedih*, 3) modalitas intensional (harapan): *yang hendak memasung*, 4) modalitas epistemik (kepastian): *saya bersetia, saya tidak ada kekecewaan*. Wacana yang ingin ditunjukkan melalui modalitas tersebut adalah upaya untuk mencitrakan diri sebagai politisi yang memiliki idealisme dan prinsip yang kuat terhadap pilihan politiknya. Dari sudut pandang historis, Wanda adalah mantan aktivis Trisakti tahun 1998, yang sangat menentang rezim orde baru dan penindasan HAM oleh militer pada peristiwa Trisakti. Pemecatan Wanda memberi pesan bahwa seolah-olah Wanda dalam posisi ditindas karena pilihan politiknya yang bersebrangan dengan partainya yang menjagokan Prabowo-Hatta dalam Pilpres. Prabowo diduga menjadi bagian dalam pelanggaran HAM pada peristiwa Trisakti 1998. Keyakinan subjektif khalayak terkait wacana pencitraan Wanda efek pemecatannya akan membentuk dan menarik minat khalayak untuk mengikuti pilihan politiknya terhadap calon presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

b. Pencitraan melalui Pronomina

Wanda Hamidah mempraktikkan strategi permainan pronomina. Menurut Kridalaksana (2007:76) pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Permainan pronomina dilakukan untuk mengacaukan subjek dan objek sebuah kalimat sehingga pendengar rancu. Permainan ini dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab, menokohkan seseorang (glorifikasi), atau menuai simpati. Dalam wacana pencitraannya, Wanda berusaha mengaburkan makna kata *saya, anda, kita, dan rakyat* dengan cara menggunakan secara bergantian seolah-olah bersinonim. Empat kata yang maknanya jauh berbeda itu dipertukarkan sehingga seolah-olah sama. Dengan cara itu, Wanda berupaya mengajak penonton agar dapat merasakan perasaannya. Jika berhasil, pengaburan ini akan membuat persoalan yang merupakan persoalan individu ini seolah-oleh menjadi persoalan publik.

Dalam kajian pragmatik, kata *kita* merupakan bentuk inklusif atau gabungan antara persona pertama (*aku, daku, saya*) dan kedua (*kamu, kau, dikau*). Secara sederhana, *kita* berarti *saya dan anda* atau *kami dan anda*. Jufri (2005:35) mengemukakan bahwa kata ganti (pronomina) merupakan aspek yang dapat dimanipulasi dengan pilihan bahasa untuk menciptakan makna imajinatif. Kata ganti *saya* dan *kami* digunakan untuk menggambarkan sikap resmi komunikator semata-mata. Kata ganti *kita* merupakan representasi dan wujud sikap bersama dalam satu komunitas. Potensi kata *kita* telah disadari politisi dapat membangkitkan sensasi kesenyatuan. Oleh karena itulah, kata ini banyak digunakan sebagai sarana pencitraan.

c. Pencitraan melalui Kalimat Positif-Negatif

Bentuk kalimat dapat memiliki muatan ideologis yang mencitrakan Wanda dan wacana respons pemecatannya. Baik kalimat positif maupun kalimat negatif dapat digunakan untuk mengekspresikan ideologi tertentu untuk menuai simpati dan pada ujungnya menokohkan seseorang (glorifikasi). Berikut contoh kalimat positif dan negatif yang memiliki muatan ideologis pencitraan.

(1) *Saya menerima konsekuensi logis atas langkah yang saya lakukan pada Pilpres kemarin*

- (2) *Saya tidak ada kekecewaan dan saya tidak ada penyesalan apa pun atas pemberhentian dari Partai Amanat Nasional.*
- (3) *Tapi sebaliknya, kekecewaan saya justru terhadap apa yang mengancam kita. Yaitu hasrat kekuatan elit politik yang hendak memasung suara saya, yang hendak memasung suara Anda. Dan hasrat kekuatan elit yang hendak memasung suara rakyat.*

Muatan ideologis pencitraan yang diekspresikan melalui kalimat positif (1) bermakna gamblang, tegas, dan lugas. Ideologi yang diperjuangkan Wanda diekspresikan secara langsung dan meyakinkan. Sebaliknya, Wanda mengekspresikan pencitraan diri secara implisit melalui kalimat negatif (2) dengan menggunakan negasi *tidak*. Bahkan kalimat (3) menggunakan negasi ganda untuk mengekspresikan secara tidak langsung pencitraannya. Penggunaan negasi ganda tersebut dilakukan untuk menghindari konfrontasi dengan partainya. Wanda tidak mengambil posisi konfrontatif demi pencitraan kesantunan dan rasa hormat kepada partainya. Hal itu terlihat dari ekspresi ketidaktegasan tuturannya dalam menyebut kubu mana yang akan memasung suaranya dan suara rakyat. Strategi ini digunakan Wanda untuk tetap menjaga citra di mata khalayak dan juga upaya menghindari persoalan ketidakpatuhannya terhadap amanat atau keputusan partai.

Fairclough (1995:138) mengemukakan bahwa ketika seseorang ingin menuangkan sesuatu yang ada dalam realitas atau sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi, seseorang itu kerap memilih pilihan yang berbeda pada proses gramatikanya. Dalam contoh tersebut, representasi ideologis Wanda dituangkan dalam dua bentuk yakni kalimat positif dan kalimat negatif.

d. Pencitraan melalui Kata Penghubung

Muatan ideologis yang bermakna pencitraan dilakukan Wanda melalui penggunaan kata penghubung. Beberapa kata penghubung yang didayagunakan Wanda, misalnya kata *meskipun, tapi, sebaliknya, karena*. Penggunaan kata penghubung tersebut berfungsi untuk membentuk citra yang kontras (berbeda), citra membandingkan, dan penegasan citra positif. Penggunaan koherensi juga dapat menimbulkan makna yang memarjinalkan (4) dan memberi penghargaan simbolik (6).

- (4) *Saya menerima konsekuensi logis atas langkah yang saya lakukan pada Pilpres kemarin, **meskipun** saya sedih karena sudah 16 tahun di PAN sejak berdirinya.*
- (5) *Saya tidak ada kekecewaan dan saya tidak ada penyesalan apa pun atas pemberhentian dari Partai Amanat Nasional. **Tapi sebaliknya**, kekecewaan saya justru terhadap apa yang mengancam kita.*
- (6) *Saya memilih pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla **karena** saya bersetia pada amanat nasional dan cita-cita reformasi."*

Rusdiarti (2003) menyatakan bahwa kekuasaan simbolik adalah kekuasaan menciptakan dunia. Dengan kekuasaan simbolik, pelaku sosial memiliki kekuasaan untuk menciptakan atau menghancurkan, memisahkan atau menyatukan, dan yang lebih penting lagi kekuasaan untuk memberi nama atau membuat definisi. Dalam tuturan (4, 5, dan 6) Wanda memiliki kekuasaan untuk memberi dan menciptakan citra simbolik atas partainya.

E. Penutup

Bahasa pencitraan sebagai strategi menanamkan ideologi yang dilakukan oleh Wanda Hamidah sebagai respons terhadap pemecatannya sebagai kader PAN dapat dilihat pada bentuk-bentuk formal teks tuturannya. Dalam teks tersebut, Wanda memainkan wacana pencitraan leksikal dengan menonjolkan bentuk-bentuk formal leksikal berupa modalitas, pronomina, kalimat positif-negatif, dan kata penghubung. Modalitas didayagunakan Wanda untuk mencitrakan diri sebagai politisi yang memiliki idealisme dan prinsip yang kuat terhadap pilihan politiknya. Permainan pronomina dilakukan untuk mengacaukan subjek dan objek sebuah kalimat sehingga pendengar rancu. Wanda berusaha mengaburkan makna kata *saya, anda, kita, dan rakyat* dengan cara menggunakan secara bergantian seolah-olah bersinonim. Pencitraan leksikal melalui penggunaan kalimat positif maupun kalimat negatif digunakan

Wanda untuk mengekspresikan ideologi tertentu untuk menuai simpati dan pada ujungnya menokohkan seseorang (glorifikasi). Adapun penggunaan kata penghubung berfungsi untuk membentuk citra yang kontras (berbeda), citra membandingkan, dan penegasan citra positif.

F. Daftar Pustaka

- Asher, R.E. dan J.M.Y. Simpson, eds. 1994. *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Volume 2. Oxford: Pergamon Press.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fairclough, Norman. 1995a. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London dan New York: Longman.
- Jufri. 2005. Penggunaan Kosa Kata dalam Wacana Berita tentang "SBY" Sekitar Pemilu 2004. *Jurnal Wacana Kritis*, Vol. 10, Januari 2005, hal. 1-11.
- Kridalaksana, Harimurti. 2004. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Renkema, Jan. 2004. *Introduction to Discourse Studies*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, dan Eva Vetter. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
- Verschueren, Jef. 1999. *Understanding Pragmatics*. London: Arnold.
- Wodak, Ruth. 2006. What CDA is about: A Summary of Its History, Important Concept, and Its Development. Dalam R. Wodak & M. Meyer (eds.). 2006. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage, hlm. 1-13.